

## **BAB V PENUTUP**

### **A. KESIMPULAN**

Pada tahun 2018, Korea Utara mengeluarkan kebijakan luar negeri berupa perdamaian terhadap Korea Selatan. Pertemuan bersejarah yang dilakukan oleh Kim Jong Un dan Presiden Moon di Perbatasan kedua negara merupakan bukti bahwa, Korea Utara serius dalam menerapkan kebijakan perdamaian terhadap Korea Selatan. Kebijakan tersebut tentu mengejutkan masyarakat Internasional tidak terkecuali Tiongkok, Rusia, dan Amerika Serikat yang selama ini turut menjadi aktor dalam konflik kedua negara.

Penulis berupaya menganalisa kebijakan perdamaian Korea Utara tersebut untuk menemukan alasan mengapa kemudian Korea Utara menerapkan kebijakan tersebut. Penulis menggunakan pendekatan kebijakan luar negeri oleh William D. Coplin. Sedikitnya terdapat 3 (tiga) konteks yang bisa menjelaskan hal tersebut sebagaimana yang dipaparkan oleh Coplin. Tindakan politik luar negeri dipandang sebagai akibat dari tiga konsiderasi yang mempengaruhi para pengambil kebijakan luar negeri”:<sup>115</sup>

1. Konteks Dalam Negeri: Adanya ancaman militer dari Amerika Serikat dan Korea Selatan.

Amerika Serikat bersama dengan Korea Selatan terus berupaya menekan Korea Utara dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas militernya di Semenanjung Korea. Hal tersebut tentu mempengaruhi kebijakan-kebijakan Korea Utara, dalam artian, Kim Jong Un mulai memikirkan bahwa tekanan dan ancaman tersebut bukan perkara yang sederhana. Tekanan tersebut memunculkan ketakutan bagi Korea Utara terlebih tidak ada dukungan penuh dari Tiongkok dan Rusia. Hal ini merupakan faktor pertama yang mempengaruhi kebijakan luar negeri Korea Utara.

---

<sup>115</sup> William D. Coplin. 1992. Pengantar Politik Internasional: Suatu Telaah Teoritis. Bandung; Sinar Baru. Hal. 30.

2. Konteks Ekonomi dan Militer: Kegagalan Uji Coba Nuklir

Selain itu, Tekanan kedua yang dilancarkan oleh Amerika Serikat dan sekutunya adalah dengan melakukan pembatasan kerjasama ekonomi dengan Korea Utara yang kemudian diikuti oleh negara-negara lain di dunia. Adapun dampak yang diterima Korea Utara adalah kerugian pendapatan dari terbatasnya kegiatan impor. Hal ini juga mempengaruhi kebijakan luar negeri Korea Utara, sebab pendanaan militer berasal dari pendapatan negara Korea Utara.

Dalam bidang militer, Korea Utara mengalami beberapa kegagalan ketika melakukan uji coba hulu ledak nuklirnya yang pada akhirnya tahun 2018, Kim Jong Un menghentikan segala bentuk uji coba senjata nuklirnya. Sebagaimana dikutip dari CNN Indonesia, disebutkan bahwa Kim Jong Un, Pemimpin Korea Utara, memutuskan untuk menanggihkan tes rudal dan menutup sejumlah tempat uji coba nuklir di wilayahnya. Korea Utara tidak perlu lagi melakukan tes nuklir atau balistik antarbenua karena telah menyelesaikan tujuannya untuk mengembangkan senjata nuklir. Upaya menyetop aktivitas uji coba nuklir tersebut tak terlepas dari keinginan Korea Utara untuk mengejar pertumbuhan ekonominya, termasuk perdamaian di semenanjung Korea. Keputusan ini diambil jelang puncak pertemuan pemimpin Korea Utara dengan Korea Selatan, Moon Jae-in, pekan depan, dan pertemuan dengan Presiden AS Donald Trump pada akhir Mei atau awal Juni

3. Konteks Lingkungan Internasional: Meningkatnya kerjasama Militer Amerika Serikat dan Korea Selatan

Semakin meningkatnya kuantitas dan kualitas uji coba nuklir Korea Utara direspon oleh negara oposisi dengan meningkatkan kerjasama militer khususnya oleh Amerika Serikat dan Korea Selatan. Tentu Korea Selatan menyadari betapa pentingnya kerjasama militer dengan Amerika Serikat dalam rangka mengimbangi kekuatan militer Korea Utara. Meningkatnya kerjasama militer antara Amerika Serikat dan Korea Selatan ini tentu mempengaruhi kebijakan luar negeri

Korea Utara. Kim Jong Un mulai melihat bahwa, Kekuatan militernya tidak sebanding dengan kekuatan Amerika Serikat dan Korea Selatan. Terlebih, tidak optimalnya dukungan dari Tiongkok dan Rusia. Kim memutuskan untuk mengeluarkan kebijakan luar negeri perdamaian terhadap Korea Selatan melihat kondisi lingkungan Internasional tersebut.